

**FORMULASI KEBIJAKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PASAR NAGARI SUNGAI TUNU BARAT KECAMATAN  
RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada tim penguji untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan  
Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang*



**YULIZAH PUTRI  
1206013 / 2012**

**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2016**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

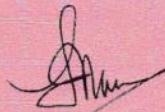
**FORMULASI KEBIJAKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PASAR NAGARI SUNGAI TUNU BARAT KECAMATAN RANAH  
PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nama : Yulizah Putri  
TM/NIM : 2012/1206013  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 02 Agustus 2016

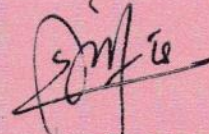
**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I**



**Dr. Maria Montessori, M.Ed, M.Si**  
NIP.19600202 198403 2 001

**Pembimbing II**



**Dra. Al Rafni, M.Si**  
NIP.19680212 199303 2 001

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

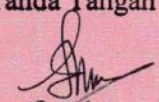
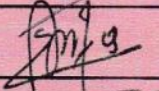

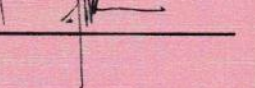
Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang  
Pada hari Selasa, 02 Agustus 2016 Pukul 08.00 s/d 10.00 WIB

**Formulasi Kebijakan Dalam Perencanaan Pembangunan Pasar Nagari  
Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan**

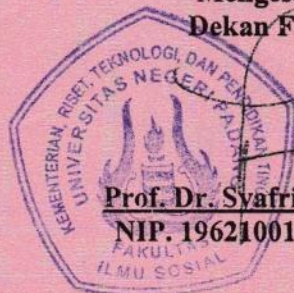
Nama : Yulizah Putri  
TM/NIM : 2012/1206013  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 02 Agustus 2016

### Tim Penguji :

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Dr. Maria Montessori, M.Ed, M.Si	
Sekretaris : Dra. Al Rafni, M.Si	
Anggota : Drs. Nurman S, M.Si	
Anggota : Dr. Fatmariza, M.Hum	

Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP



**Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd**  
NIP. 19621001 198903 1 002

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YULIZAH PUTRI  
Nim/Tahun Masuk : 1206013/2012  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Formulasi Kebijakan Dalam Perencanaan Pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 02 Agustus 2016

Saya yang menyatakan



YULIZAH PURI  
NIM. 1206013

## ABSTRAK

### **Yulizah Putri (1206013/2012) : Formulasi Kebijakan Dalam Perencanaan Pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tidak berfungsinya Pasar Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Formulasi Kebijakan Dalam Perencanaan Pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat sudah ideal dan dikategorikan ke dalam model pilihan publik (*bottom-up*). Tahapannya melalui perumusan masalah, penetapan agenda, perumusan usulan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Yaitu dimulai dari tahap musrenbang kampung, sampai pada musyawarah pertanggung jawaban dana oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Meskipun sudah melalui formulasi yang benar, tetapi kebijakan tidak membawa dampak positif bagi masyarakat. Hal ini terjadi, karena lokasi pasar tidak sesuai dengan harapan masyarakat, padahal masyarakat menginginkan lokasi di tempat lain, tapi karena kekurangan dana terpaksa lokasi ditetapkan di pinggir pantai. Sehingga masyarakat tidak berminat ke pasar dan akhirnya pasar tidak berfungsi. Oleh karena itu ketersediaan dana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan, sebab ketersediaan dana ikut menunjang keberhasilan kebijakan. Meskipun ada masyarakat yang berpandangan positif terhadap lokasi pasar, namun pada umumnya masyarakat berpandangan negatif.

Kata Kunci: Kebijakan, pasar, musrenbang

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, yang berjudul : **“Formulasi Kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.”** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik dan Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, M.pd selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dr. Maria Montessori, M.Ed, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Al Rafni, M.Si selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Alia Azmi, S. IP., M.Si, Bapak Drs. Nurman S, M.Si dan Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku tim penguji yang telah memberikan masukan berupa kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Al Rafni, M.Si selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah memberi petunjuk dan bimbingan selama perkuliahan sampai penulisan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pelajaran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Staf kepastakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Sosial Politik dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Segenap pemerintah nagari dan anggota masyarakat Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
9. Papa dan Mama atas cinta, do'a, dan dukungan yang tiada henti dan kedua kakakku Incim Cendra Leni, S.Pd dan Abang Priadi Liska, M.Pd yang selalu memberikan semangat, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kepada penulis.
10. Rekan-rekan mahasiswa Prodi PPKn terutama angkatan 2012, yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan kepada penulis.
11. Semua pihak yang turut membantu dengan sukarela memberikan bantuan baik berupa pemikiran, masukan, maupun buku-buku yang relevan, sehingga penulisan skripsi ini selesai, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih.

Penulis telah berusaha seoptimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Karena itu penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Amin.

Padang, April 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Pembatasan Masalah .....	10
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Teori.....	12
1. Konsep Kebijakan Publik.....	12
2. Konsep Formulasi Kebijakan Publik .....	15
a. Proses Formulasi Kebijakan Publik .....	15
b. Model-Model Formulasi Kebijakan .....	21
a) model pilihan publik .....	25
3. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan .....	26
4. Pendekatan Pengambilan Keputusan .....	30
a. Top Down .....	30
b. Bottom Up .....	31
5. Konsep Pasar Nagari .....	32
B. Kerangka Konseptual .....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	36

B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Informan Penelitian .....	37
D. Jenis, Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	40
E. Uji Keabsahan Data .....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum.....	45
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
2. Kependudukan.....	50
3. Pasar Nagari Sungai Tunu Barat.....	53
B. Temuan Khusus .....	58
1. Formulasi kebijakan perencanaan pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan .....	58
2. Pandangan masyarakat tentang kebijakan pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat .....	101
C. Pembahasan.....	108
1. Formulasi kebijakan perencanaan pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan .....	108
2. Pandangan masyarakat tentang kebijakan pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat .....	119
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I	Daftar Informan Penelitian .....	38
Tabel 2	Jumlah Penduduk Nagari Sungai Tunu Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015 .....	50
Tabel 3	Data Tingkat Pendidikan Penduduk Nagari Sungai Tunu Barat Tahun 2015 .....	51
Tabel 4	Data Jenis Mata Pencaharian Pokok Penduduk Nagari Sungai Tunu Barat Tahun 2015.....	51
Tabel 5	Kegiatan Musrenbang Kampung.....	65
Tabel 6	Kegiatan Musrenbang Kampung (2) .....	75
Tabel 7	Kegiatan Musrenbang Kecamatan.....	88
Tabel 8	Kegiatan Musrenbang Sosialisasi PNPM.....	91
Tabel 9	Kegiatan Pertanggungjawaban dana oleh TPK .....	96

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tangga Partisipasi dari Arnstein .....	28
Gambar 2	Kerangka Konseptual Proses Formulasi Kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan .....	35
Gambar 3	Stuktur Pemerintahan Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan .....	48
Gambar 4	Stuktur Organisasi Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan .....	49
Gambar 5	Pasar Nagari Sungai Tunu Barat .....	55
Gambar 6	Fasilitas Pasar (WC) Nagari Sungai Tunu Barat .....	56
Gambar 7	Tangga Partisipasi dari Arnstein .....	116

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Pedoman wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Daftar Hadir Musyawarah
- Lampiran 4 Izin Penelitian
- Lampiran 5 Izin Penelitian
- Lampiran 6 Keterangan Penelitian

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak reformasi Indonesia mulai membenahi sistem pemerintah daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian diperbaharui dari tahun ke tahun dan terakhir diperbaharui dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mempermudah kinerja Pemerintah Pusat terhadap daerahnya sehingga digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka setiap daerah memiliki kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri.

Partisipasi masyarakat menjadi indikator penting demi tercapainya keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sesuai dengan pernyataan Josef Riwu (2010: 120) yang menyatakan bahwa, “Keberhasilan penyelenggaraan otonomi Daerah tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya”. Bentuk partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar ikut terlibat saja. Namun masyarakat harus berpartisipasi aktif mulai dari proses perencanaan, formulasi (perumusan), pelaksanaan, sampai mengevaluasi maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Terutama dalam formulasi (perumusan) kebijakan dibidang pembangunan partisipasi dari masyarakat menjadi suatu keharusan, karena kebijakan dibuat untuk memecahkan persoalan-persoalan masyarakat, dan mereka pula yang

mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya, sebab yang akan memanfaatkan dan menilai berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayahnya adalah masyarakat yang bersangkutan. Jadi kebijakan dibuat tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi (keterlibatan) masyarakat menjadi unsur yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

Namun pada kenyataannya dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan yang dilakukan selama ini cenderung menggunakan pendekatan *top-down*, yaitu dalam penentuan kebijakan pembangunannya berasal dari atas (pejabat yang berwenang), tanpa mengikutsertakan masyarakat dan stakeholder yang lainnya, akibatnya banyak ditemukan masyarakat tidak memiliki dan tidak dapat merasakan manfaat dari kegiatan pembangunan yang telah berjalan (Laksana dalam Fikri Azhar, 2015: 64).

Sehingga pembangunan yang dihasilkan dari kebijakan tersebut tidaklah efektif (tidak bermanfaat), karena pembangunan yang dihasilkan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat sebagai orang yang seharusnya menikmati ikut (merasakan) hasil dari kebijakan tersebut tidak turut merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Sebagaimana yang sering terjadi pada belakangan ini, banyak dilakukan pembangunan dimana-mana yang merupakan hasil dari kebijakan pemerintah, tetapi hasil dari pembangunan tersebut tidak berguna (bermanfaat) oleh masyarakat, seperti kasus-kasus pasar yang gagal setelah dilakukan pembangunan, yaitu Pasar Raya Impress Kota Padang yang merupakan kebijakan pemerintah kota dalam

menertibkan pedagang agar tidak berjualan di badan jalan, namun dalam kebijakannya tidak melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga pada akhirnya setelah pembangunan selesai bangunan tersebut hanya menjadi pembangunan yang sia-sia karena tidak dipergunakan oleh masyarakat. Begitu pun halnya dengan Pasar Bungus, Pasar Amor Bukittinggi, Pasar Lubuk Alung, ataupun bangunan lainnya seperti terminal Air Pacah Kota Padang yang juga merupakan kebijakan dari pemerintah kota tanpa partisipasi dari masyarakat, sehingga bangunan telah lama dibangun, tapi tidak terpakai (digunakan) oleh masyarakat.

Kondisi seperti itu terjadi sebenarnya karena masalah dalam perumusan kebijakannya, yang seharusnya dalam penyusunan kebijakan sejak awal melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam menentukan arah kebijakan (dengan pendekatan *bottom-up*). Sehingga melahirkan kebijakan yang adil dan demokratis, dengan menjunjung tinggi keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Serta selalu menjadikan persoalan dan aspirasi masyarakat sebagai pertimbangan dalam mengambil setiap kebijakan. Maka kebijakan yang baik selalu berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Karena pada akhirnya yang akan menerima, melaksanakan serta memperoleh manfaat dari suatu kebijakan adalah masyarakat sendiri.

Thomas dalam Muchlis (2014:91) mengatakan, bahwa keterlibatan publik dapat memperkuat efektivitas pemerintahan melalui perbaikan kesesuaian program kebijakan dengan kebutuhan warga negara, peningkatan

penerimaan masyarakat terhadap program, atau penstimulasian bantuan warga negara dalam pelaksanaan program. Sehingga mulai dari formulasi sampai menikmati hasil kebijakan selalu saja melibatkan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat memiliki peranan dalam setiap pembangunan untuk mengusulkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya.

Makanya pada akhir ini, dalam rangka otonomi daerah, baik pemerintah pusat maupun daerah saat pengambilan kebijakannya dituntut untuk melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan. Sebenarnya keikutsertaan (keterlibatan) masyarakat pada dasarnya telah diatur dalam UU No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yang mewajibkan peran serta masyarakat. Pasal 1 ayat 21 UU No 25 tahun 2004 menjelaskan yang dimaksud dengan Musrenbang yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang, yang merupakan forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.

Tujuan diadakannya Musrenbang yaitu untuk mengikutsertakan masyarakat dan mengetahui rencana pembangunan yang akan dilakukan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 4 huruf d menyatakan, “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat”. Musrenbang menjadi ruang publik yang berguna untuk menampung aspirasi masyarakat serta keluhan masyarakat terkait pembangunan kedepan mulai dari mengenali masalah,

kebutuhan, tantangan eksternal, potensi yang ada serta penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat (Fikri Azhar, 2015:65).

Mengacu pada Undang-Undang diatas, maka pemerintah Nagari Sungai Tunu Barat sebelum menetapkan kebijakan pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat, terlebih dahulu mengadakan Musrenbang, baik ditingkat kampung maupun nagari sampai pada kecamatan yang selalu melibatkan partisipasi dari masyarakat. Berdasarkan keputusan musrebang kecamatan ditetapkan kebijakan pembangunan yang dilakukan di Nagari Sungai Tunu Barat yaitu pembangunan pasar.

Maka pada tanggal 12 Juli 2010 Pasar Nagari Sungai Tunu Barat mulai dibangun dan selesai pada 31 Desember 2010, kemudian diresmikan pada 29 Juli 2011, oleh perwakilan camat dengan mengundang masyarakat dan diadakannya orgen tunggal di pasar tersebut. Tujuan didirikannya Pasar adalah untuk mendekatkan masyarakat pergi ke pasar, karena di Nagari Sungai Tunu Barat tidak ada pasar, jadi selama ini untuk pergi belanja ke pasar masyarakat pergi ke pasar nagari tetangga, yaitu pasar Lagan dan Sungai Tunu. Disamping itu pasar bertujuan untuk memajukan ekonomi Nagari Sungai Tunu Barat (berdasarkan wawancara dengan Wali Nagari Zulkifli, pada observasi awal tanggal 11 Agustus 2015). Oleh karena itu, pasar dibutuhkan di Nagari Sungai Tunu Barat.

Namun kenyataannya, setelah pasar diresmikan dan dikeluarkannya Pernag (Peraturan Nagari) Sungai Tunu Barat Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar. Seharusnya pasar berfungsi karena pasar dibutuhkan

masyarakat, tetapi yang terjadi adalah Pasar Nagari Sungai Tunu Barat tidak berfungsi, atau dengan kata lain pembangunan dari hasil kebijakan tersebut justru tidak dimanfaatkan (digunakan) oleh masyarakat. Sehingga sampai sekarang tidak ada masyarakat yang berjualan dipasar tersebut.

Dalam observasi awal, ada beberapa masyarakat yang berhasil penulis wawancara. Menurut Dewi Risnawati yang rumahnya didekat lokasi pasar mengatakan, bahwa semenjak pasar diresmikan tidak pernah sekalipun masyarakat pergi (berjualan) ke pasar, kecuali waktu peresmian pasar, acara Maulud Nabi anak Sekolah Dasar (SD), dan rapat-rapat kelompok Desa. Padahal waktu peresmian pasar, wali nagari sudah mensosialisasikan atau menghimbau masyarakat untuk mulai berjualan ke pasar. Bahkan kalau ada acara-acara di pasar atau di mesjid wali nagari mengajak masyarakat untuk segera memulai aktivitas pasar (observasi awal pada tanggal 10 Agustus 2015).

Berdasarkan observasi berikutnya, salah satu masyarakat mengatakan bahwa sepengetahuannya semenjak pasar diresmikan tidak pernah sekalipun pedagang yang pergi berjualan ke pasar. Bahkan sepengetahuannya pemerintahan nagari tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat atau terdengar kabar agar aktivitas pasar segera dimulai. Beliau mengatakan alasan pasar tidak beroperasi karena masyarakat tidak pernah pergi ke pasar sebab lokasinya jauh dari jalan (berada di pinggir pantai) yaitu sekitar 50 meter dari jalan umum menuju lokasi pasar, sehingga pasar tidak kelihatan dari luar (jalan umum). Beliau juga mengatakan rencananya pasar tersebut akan

dibangun sebelum jembatan Sekolah Dasar (SD) yang dekat dengan jalan umum yang sering dilalui masyarakat. Namun lokasinya jadi pindah ke pinggir pantai beliau pun tidak mengetahuinya, sebab beliau tidak pernah menghadiri rapat perencanaan pembangunan pasar (berdasarkan wawancara dengan Idis pada observasi awal tanggal 11 Agustus 2015).

Adapun menurut wali nagari yang penulis temui di kantor wali nagari, Beliau mengatakan alasan utama tidak beroperasinya pasar yaitu karena kurangnya minat dari masyarakat untuk pergi belanja ke pasar, karena apa yang dicari pembeli tidak lengkap dipasar. Selain itu adanya pasar sore di Lagan, yang dekat dengan Nagari Sungai Tunu Barat yaitu jaraknya dengan lokasi Pasar Sungai Tunu Barat kira-kira sekitar 5 km (jarak tempuh sekitar 15 menit), selain itu Pasar Lagan juga ramai, apa yang dibutuhkan masyarakat ada disana.

Maka hal itu membuat masyarakat berpindah kesana atau lebih memilih untuk pergi berbelanja ke Pasar Lagan. Sedangkan 4 km dari Pasar Sungai Tunu Barat juga terdapat Pasar Sungai Tunu (pasar pada hari rabu) yang jaraknya dengan pasar lagan kurang lebih 1 km. Tepatnya Pasar Sungai Tunu terletak diantara Pasar Sungai Tunu Barat dan Pasar Lagan. Namun karena Pasar Sungai Tunu hanya ada pada Hari Rabu jadi masyarakat lebih sering ke Pasar Lagan untuk sehari-hari. Sedangkan pada hari rabu masyarakat lebih banyak ke Pasar Sungai Tunu. Sehingga karena kalah bersaing dengan pasar-pasar lain akhirnya Pasar Sungai Tunu Barat tidak berfungsi. (berdasarkan

observasi awal, wawancara bersama Wali Nagari Sungai Tunu Barat tanggal 11 Agustus 2015).

Berdasarkan observasi awal tersebut diketahui alasan pasar tidak beroperasi karena lokasi pasar yang jauh dari keramaian, tidak ada pedagang yang berjualan di pasar sehingga aktivitas pasar tidak berjalan, dan kalah bersaing dengan pasar nagari tetangga. Masyarakat juga berpandangan bahwa Pasar Rabu (Sungai Tunu) yang lokasinya sudah di dekat jalan umum masih tidak ramai, apalagi Pasar Sungai Tunu Barat yang lokasinya jauh di pinggir pantai.

Hampir sama dengan kasus pembangunan yang dikemukakan sebelumnya, yaitu pembangunan dari kebijakan tersebut tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, karena dalam formulasi kebijakannya menggunakan pendekatan secara *top-down*. Namun berbeda halnya dengan kasus pembangunan-pembangunan tersebut, justru formulasi kebijakan pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat telah dilakukan secara *bottom-up* dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat dan seharusnya akan membawa hasil yang lebih baik dan berbeda dengan kebijakan-kebijakan pembangunan sebelumnya.

Namun kenyataan yang ditemui sama dengan pembangunan-pembangunan sebelumnya justru kebijakan pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat tetap tidak bermanfaat bagi masyarakat, walaupun usulan pembangunan sebenarnya berasal dari keinginan masyarakat. Sehingga meskipun formulasi kebijakan perencanaan pembangunan Pasar Nagari

Sungai Tunu Barat telah dilakukan dengan pendekatan yang berbeda, tetapi hasilnya tetap sama dengan kebijakan yang dilakukan secara *top-down*.

Maka dalam hal ini, meski suatu kebijakan melibatkan partisipasi masyarakat, hal itu tidak menjamin kebijakan tersebut dapat terimplementasi dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat sepenuhnya, karena pengambilan kebijakan dan implementasinya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Formulasi Kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat diajukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masyarakat telah melakukan Musrenbang untuk pembangunan pasar namun minat masyarakat masih rendah untuk memanfaatkan fasilitas di pasar.
2. Kebijakan nagari (Pernag tentang pasar telah dibentuk) namun pemerintah nagari belum maksimal dalam mensosialisasikan pasar kepada masyarakat
3. Masih banyak masyarakat yang mempunyai tanggapan negatif terhadap keberadaan pasar

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada “Formulasi Kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.”

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang ada maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana formulasi kebijakan perencanaan pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang kebijakan pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang kebijakan pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai salah satu bentuk penerapan dari teori keilmuan yang telah dipelajari dalam mata kuliah Kebijakan Publik

- b. Sebagai tambahan referensi bagi pembaca dalam bidang Kebijakan Publik terutama formulasi kebijakan publik
2. Secara Praktis
    - a. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan bagi pemerintah nagari, khususnya bagi Kenagarian Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
    - b. Bagi masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat atas segala hasil yang penulis dapatkan berkenaan dengan Formulasi Kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
    - c. Memberikan masukan dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian yang penulis lakukan di Nagari Sungai Tunu Barat tentang Formulasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat dapat disimpulkan bahwa:

1. Formulasi kebijakan Perencanaan Pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat dapat dikatakan sudah ideal, karena kebijakannya dilakukan dengan pendekatan *bottom-up* (melibatkan partisipasi masyarakat). Begitu pun dengan formulasinya telah sesuai dengan tahap-tahap dalam perumusan kebijakan publik, yaitu melalui perumusan masalah, penetapan agenda kebijakan, perumusan usulan kebijakan, penetapan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Hanya saja hasil kebijakannya yang tidak bermanfaat. Jadi meskipun suatu kebijakan sudah benar (sesuai prosedur), tidak menjamin kebijakan tersebut berdampak positif (bermanfaat bagi masyarakat). Karena tidak ada jaminan setiap kebijakan yang bagus (dilakukan sesuai prosedur) bisa terimplementasi dengan baik, sebab kebijakan dalam pengimplementasiannya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya faktor sumber daya, baik sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya finansial (dana) yang ikut menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.
2. Formulasi kebijakan perencanaan pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat melalui dilakukan melalui enam tahap, yaitu: a) musrenbang

kampung, b) musrenbang nagari, c) musrenbang kecamatan, d) musrenbang sosialisasi PNPM, e) musyawarah sebelum pelaksanaan pembangunan, dan f) musyawarah pertanggungjawaban dana oleh TPK. Setiap tahap formulasi kebijakan perencanaan pembangunan pasar Nagari Sungai Tunu Barat, sudah dilakukan secara berurut (sesuai tahap seharusnya). Namun masih terdapat kekurangan pada dua tahap yaitu pada tahap musrenbang nagari dalam penetapan lokasi pasar dalam pelaksanaannya sudah melibatkan partisipasi masyarakat, namun dalam prosesnya partisipasi masyarakat hanya sebatas membuat kesepakatan (terlibat) dengan pemerintah nagari, namun dalam pengambilan kebijakan masih berada ditangan pemerintah. Selain itu juga terdapat kelemahan pada satu tahap yang tidak dilaksanakan dengan baik (secara jujur), seperti yang terdapat pada tahap musyawarah pertanggungjawaban dana oleh TPK yaitu dalam prosesnya terjadinya manipulasi daftar hadir dalam musyawarah pertanggungjawaban dana I dan II. Jadi secara prosedur formulasi yang dilakukan sudah melalui tahap demi tahap (tepat) hanya saja masih terdapat kelemahan-kelemahan.

3. Dari enam tahap formulasi yang dilakukan tahap yang paling penting adalah tahap penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*) yang terdapat pada musrenbang nagari dan musrenbang kecamatan. Sehingga dalam prosesnya tidak terlepas dari berbagai pengaruh seperti kekuasaan, kepentingan dan politik dalam pengambilan kebijakannya.

4. Dalam pembuatan suatu kebijakan akan selalu ada pihak yang setuju (*pro* kebijakan) dan pihak yang tidak setuju (*kontra* kebijakan), dengan berbagai alasan dan tergantung persepsi atau penilaiannya terhadap kebijakan tersebut. Untuk meminimalisir masyarakat yang kontra dengan kebijakan tersebut, pemerintah harus mampu memilih alternatif-alternatif yang paling memuaskan, mudah diimplementasikan dan yang terpenting hasil dari kebijakan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.
5. Terdapat dua pandangan masyarakat Nagari Sungai Tunu Barat terhadap kebijakan pembangunan pasar, yaitu berpandangan positif dan negatif. Namun pada umumnya masyarakat berpandangan negatif terhadap kebijakan pembangunan pasar, sebenarnya sebagian besar masyarakat setuju dengan kebijakan pembangunan pasar, hanya saja mereka berpandangan negatif karena tidak setuju dengan penetapan lokasi pasar yang dianggap tidak strategis. Sehingga masyarakat tidak berminat pergi ke pasar dan akhirnya sampai sekarang pasar tidak berfungsi.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dalam rangka melaksanakan formulasi kebijakan di Nagari Sungai Tunu Barat yaitu :

1. Pemerintah Nagari dalam pengambilan kebijakan harus bisa sebagai penengah diantara berbagai kepentingan yang terdapat dalam pembuatan setiap kebijakan. Agar hasil dari kebijakan tersebut dapat menguntungkan semua pihak termasuk masyarakat. Karena memang dalam formulasi

kebijakan akan selalu ada banyak pertimbangan dan dipengaruhi berbagai faktor seperti kekuasaan, politik dan kepentingan yang termuat didalamnya.

2. Pemerintah Nagari dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat harus melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh, sebab pembangunan yang dilakukan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan yang akan menikmati (mempergunakan) hasil dari pembangunan tersebut adalah masyarakat. Sehingga dalam pembuatan kebijakan terutama dalam pembangunan nagari tidak bisa terlepas dari peran masyarakat yang bersangkutan.
3. Pemerintah Nagari harus lebih maksimal dalam mensosialisasikan pasar kepada masyarakat. Agar kebijakan pembangunan Pasar Nagari Sungai Tunu Barat dapat terimplementasi dengan baik. Namun jika pasar tetap tidak berfungsi, pemerintah nagari harus mencari solusi lain seperti mengalihfungsikan pasar, sehingga pembangunan yang telah dilakukan tetap bermanfaat.
4. Masyarakat dan tokoh masyarakat sebagai warga negara yang baik harus memiliki daya kritis dan mempunyai inisiatif untuk memajukan pasar. Tidak hanya menunggu tindakan dari pemerintah, tapi masyarakat juga harus berfikir agar pembangunan yang telah dilakukan tidak menjadi sia-sia.
5. Pemerintah nagari dan masyarakat harus saling bekerjasama mencari solusi terkait tidak berfungsinya pasar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Acuan Buku

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Damsar. 2002. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Dwiyanto Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Dunn, William.2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Hamid Darmadi. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Harbani Pasolong. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Hessel Nogi S.Tangkilisan.2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widisarana Indonesia
- Irfan Islamy.2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Josef Riwu Kaho.2010. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara`Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Leo Agustino.2008. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Lexy. J. moleong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchlis Hamdi. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Muhlis Madani. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu